

KEPEMIMPINAN ETIS SEBAGAI DETERMINAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

Oleh :

M. I. Suhifatullah¹

E-mail : mmuis@ymail.com

ABSTRAK

Pendidikan karakter di sekolah akan sulit mencapai hasil yang maksimal, apabila hanya bertumpu pada upaya perbaikan konten kurikulum, proses pembelajaran dan sejumlah aturan yang dapat mengendalikan perilaku siswa di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah lebih membutuhkan proses pembiasaan melalui keteladanan para figur pimpinan atau orang-orang yang berpengaruh di sekolah, yakni kepala sekolah, para guru dan staf kependidikan. Karena itu, demi keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, para figur pimpinan tersebut harus menjalankan kepemimpinan etis, yaitu suatu perilaku kepemimpinan yang lebih mengedepankan aspek moralitas dalam mempengaruhi dan menuntun seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kepemimpinan etis di sekolah, maka internalisasi nilai-nilai yang dapat membentuk karakter siswa akan berlangsung lebih efektif.

Kata Kunci : *Kepemimpinan Etis, Pendidikan Karakter*

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah ditengarai masih belum serius dalam penanaman nilai-nilai moral terhadap peserta didik. Pendidikan di sekolah lebih memprioritaskan pendidikan intelek atau akademis yang lebih mengembangkan kemampuan berpikir logika kognitif belaka. Padahal pendidikan tanpa memperhatikan masalah moral atau karakter merupakan bahaya yang sangat besar. Theodore Roosevelt dalam Ratna Megawangi (2010) pernah menyatakan bahwa: “*to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat).

Ungkapan Theodore Roosevelt di atas nampaknya sedang terjadi di Indonesia, Hal tersebut ditandai dengan adanya degradasi nilai-nilai moral dari tingkat akar rumput hingga para pemimpin bangsa. Kasus narkoba yang makin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa yang menjadi tontonan di televisi, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi yang makin vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik, hubungan seks bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda, siswa dan mahasiswa, tindakan KKN di mana-mana, kasus mafia hukum dan peradilan, kasus money politics dalam pemilukada dan pemilu legislatif, pencemaran dan penghancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang makin tajam dan tidak fair, adalah sedikit contoh kecil dari gunung es degradasi nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dewasa ini.

¹ Dosen Tetap UIKA Bogor

Sinyalemen adanya degradasi nilai-nilai moral di atas sudah seharusnya membangkitkan kesadaran pemerintah dan semua elemen bangsa untuk lebih serius melaksanakan pendidikan karakter di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Upaya pemerintah tidak hanya sekedar merumuskan kurikulum pendidikan karakter dan sejumlah aturan kesiswaan, tetapi harus menyiapkan sarana dan prasarannya, manajemen pendidikannya, dan adanya perilaku kepemimpinan yang baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru dan staf sesuai fungsinya masing-masing untuk menciptakan budaya sekolah yang kondusif sehingga mendukung terhadap implementasi pendidikan karakter. Martha Goni mengungkapkan bahwa: “Persoalannya adalah pendidikan karakter tidak cukup sekedar “diajarkan” secara teori, tetapi perlu didukung oleh contoh atau teladan dari pengajar itu sendiri. Dalam konteks ini, pengambil kebijakan (pemimpin) haruslah terlebih dahulu memberikan teladan, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. (<http://attanovi752011.blogspot.com/2012/12/kepemimpinan-etis-dan-relevansinya-bagi.html>)

Atas dasar hal di atas, maka penyadaran dan internalisasi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, disiplin, peduli, sopan, dan lain lain, sudah semestinya dibangun secara konsisten melalui pendidikan karakter yang mengedepankan perilaku kepemimpinan etik dari para figur pemimpin di sekolah yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin di kelas. Menurut John Dewey dalam Lickona (2013:139), bahwa: “Pendidikan telah gagal jika pendidikan tersebut mengabaikan sekolah sebagai sebuah bentuk dari komunitas kehidupan. Untuk dapat berhasil dalam mengajarkan rasa hormat dan tanggung jawab, maka para guru harus membina perkembangan komunitas moral kelas sebagai tujuan inti dari pendidikan.

Berdasarkan pada pemikiran di atas jelaslah, bahwa pendidikan karakter di sekolah harus didukung oleh perilaku kepemimpinan etis dari para pemangku pendidikan di sekolah, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, dan staf sesuai kapasitasnya masing-masing, sehingga proses internalisasi nilai-nilai moral terhadap siswa dapat berjalan efektif.

B. Isi Kajian

1. Konsep Kepemimpinan Etis

Kepemimpinan etis sebenarnya merupakan penggabungan dari dua konsep, yakni “kepemimpinan” dan “etis”. Karena itu sebelum menjelaskan makna dari kepemimpinan etis, ada baiknya terlebih dulu dijelaskan masing-masing konsep tersebut.

Kepemimpinan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini seperti diungkapkan oleh Vaughan dan Hogg dalam Bedjo Sujanto (2007:67), bahwa “kepemimpinan adalah usaha menggerakkan orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama (kelompok).” Diungkapkan pula oleh Munandar (2001: 166), bahwa: “kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting bagi manajer. Para manajer merupakan pemimpin dalam organisasi, sebaliknya pemimpin tidak perlu menjadi manajer.” Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin dapat bersifat formal dan non formal/informal.

Pemimpin formal terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal, sedangkan pemimpin informal adalah pemimpin yang terjadi karena

walaupun tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Kemampuan mempengaruhi orang lain tersebut dapat melalui kekuasaan yang bersumber pada imbalan, paksaan, keahlian, acuan hukum, kharisma/kekuatan pribadi.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan serangkaian perilaku atau tindakan pemimpin dalam suatu kelompok formal maupun informal yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

Sedangkan kata “Etis” merupakan bentuk kata sifat dari “Etika”. *Webster’s Student Dictionary* merumuskan pengertian “Etika” sebagai “*The study and philosophy of human conduct, with emphasis on the determination of right and wrong. The basic principles of right action. A work or treatise on morals*” (Etika adalah kajian dan filsafat tentang tingkah laku manusia, dengan penekanan pada determinasi benar dan salah. Prinsip dasarnya yaitu tindakan yang benar. Suatu tindakan atau ajaran tentang moral).

Pada pengertian yang paling dasar, etika dapat pula diartikan sebagai sistem nilai pribadi yang digunakan dalam memutuskan apa yang benar, atau apa yang paling tepat, dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi.

Jadi, berdasarkan pada pengertian kepemimpinan dan etika di atas, maka kepemimpinan etis dapat berarti kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi dan menuntun seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral.

Kepemimpinan etis merupakan jenis perilaku kepemimpinan moral. Karena itu pemimpin yang etis menunjuk pada kualitas pribadi pemimpin itu sendiri. Keduanya saling terintegrasi. Kepemimpinan etis menunjukkan pemimpin yang etis. Sebaliknya pemimpin yang etis menunjukkan model kepemimpinan etis. Standar pengukuran atau evaluasi kepemimpinan etis terdapat dalam diri pemimpin itu sendiri. Yukl (2005:480) menyebutkan, bahwa: “Contoh standar moral yang digunakan untuk mengevaluasi meliputi “batasan di mana perilaku pemimpin melanggar UU dasar masyarakat, menyangkal hak orang lain, membahayakan kesehatan dan kehidupan dari orang lain, atau melibatkan upaya untuk menipu dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi”.

Ungkapan Yukl di atas menunjukkan bahwa suatu kepemimpinan dapat dikatakan bermoral atau etis apabila menjunjung tinggi norma-norma, kaidah-kaidah atau undang-undang yang berlaku di masyarakat serta tidak mencederai atau melukai secara psikis maupun fisik masyarakatnya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Rawls, J. (1971:28), bahwa : “*Ethical Leadership is leading by knowing and doing what is right. The problem with ethical leadership is that it is difficult to define “right”. Ethical leadership is divided into two parts. The leader must act and make decisions ethically, and second, the leader must also lead ethically in their attitudes and interactions.* (Kepemimpinan etis berarti memimpin dengan mengetahui dan melakukan apa yang benar. Masalahnya dalam melaksanakan kepemimpinan etis adalah mengalami kesulitan untuk mendefinisikan "benar". Kepemimpinan etis dibagi menjadi dua bagian. Pemimpin harus bertindak dan membuat keputusan etis, dan kedua, pemimpin juga harus memimpin etis dalam sikap dan interaksi dengan pengikut/bawahan.

Beretika dan bermoral dalam berperilaku atau dalam mengambil keputusan sangat penting bagi pemimpin. Karena hal ini dapat menjadi modalitas dalam membangun kepercayaan para pengikutnya. Apalagi di era masyarakat yang semakin cerdas dan kritis serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis, maka kepemimpinan yang mengedepankan etika dan moral akan semakin dapat diterima pengikutnya. Terkait hal ini Trevino, L. K., et al. (2003:37) mengatakan bahwa: *“Leaders who are ethical demonstrate a level of integrity that is important for stimulating a sense of leader trustworthiness, which is important for followers to accept the vision of the leader.”* (Pemimpin yang beretika menunjukkan tingkat integritas yang tinggi untuk menumbuhkan sifat dapat dipercaya dari seorang pemimpin, hal ini penting bagi pengikut untuk menerima visi dari seorang pemimpin). Menurut Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002:611), bahwa *“These are critical and direct components to leading ethically.”* (Ini adalah komponen penting dan langsung terkait dengan etika memimpin.). Selanjutnya Trevino, L. K., et.al. mengungkapkan, bahwa *The character and integrity of the leader provide the basis for personal characteristics that direct a leader’s ethical beliefs, values, and decisions.”* (Karakter dan integritas pemimpin memberikan dasar untuk karakteristik pribadi yang mengarahkan seorang pemimpin memiliki keyakinan etis, nilai-nilai, dan keputusan.)

Berdasarkan pada paparan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa kepemimpinan etis adalah suatu pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mau bekerjasama atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang berlandaskan pada sistem nilai atau etika moralitas tertentu.

2. Nilai dan Etika dalam Kepemimpinan

Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin menurut Lia Dwikristanti dalam <http://liadwikristanti.wordpress.com/2013/04/12/nilai-dan-etika-dalam-kepemimpi-nan/> diunduh 12/8/2014 -pukul-08.00, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, susila dan ajaran tentang baik dan buruk;
- 2) Tanggungjawab. Pemimpin harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi;
- 3) Visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah ke mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin;
- 4) Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan;
- 5) Keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas dan moralitas pemimpin;
- 6) Menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya;

- 7) Beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri;
- 8) Kemampuan berkomunikasi. Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien;
- 9) Komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM.

Dalam <http://www.sagepub.com/upm-data/47445chp16.pdf>, diungkapkan bahwa “ada lima prinsip yang diyakini mengarah pada pengembangan kepemimpinan etis, yakni menghormati orang lain, pelayanan kepada orang lain, keadilan bagi orang lain, kejujuran terhadap orang lain, dan membangun komunitas dengan orang lain.”

Selain nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, etika yang baik juga harus dimiliki agar dapat menjalankan kepemimpinan secara efektif dan efisien. Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik-baik. Adapun etika dalam kepemimpinan sebagaimana diungkapkan oleh Lia Dwikristanti dalam <http://liadwikristanti.wordpress.com/2013/04/12/nilai-dan-etika-dalam-kepemimpinan/> diunduh 12/08/ 2014-pukul-08.00, sebagai berikut:

- 1) Menjaga perasaan orang lain,
- 2) Memecahkan masalah dengan rendah hati,
- 3) Menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai pendapat orang lain,
- 4) Mengutamakan proses dialogis dalam memecahkan masalah,
- 5) Menanggapi suatu masalah dengan cepat, dan sesuai dengan keahlian,
- 6) Menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya.

Sedangkan Northouse, (2013:132) mengungkapkan, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin etis, akan lebih mudah jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ke dalam pemikiran kita :

- Apakah ini hal yang benar dan adil untuk dilakukan?
- Apakah ini sesuatu yang baik untuk dilakukan?
- Apakah saya menaruh hormat kepada orang lain?
- Apakah saya memperlakukan orang lain dengan murah hati?
- Apakah saya jujur terhadap orang lain?
- Apakah tindakan saya melayani masyarakat?

Berdasarkan pada paparan dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa kepemimpinan etis berpijak pada nilai-nilai atau perinsip-prinsip antara lain; hormat pada orang lain, melayani sepenuh hati, berkeadilan, empati, jujur, bertanggung jawab, membangun kesetaraan dalam komunitas, serta rendah hati, sehingga dapat menjadi teladan, motivasi dan inspirasi bagi para pengikutnya.

3. Konsep Pendidikan Karakter

Karakter atau akhlak atau tabiat dapat dimaknai secara natural dan kultural. Secara natural karakter dapat dimaknai sebagai “dinamika sistem mental atau moral seseorang dalam merespon lingkungan secara spontan yang meliputi pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral yang terbentuk dari sistem tata nilai yang secara dominan berlaku di lingkungan kehidupannya.” Sedangkan dalam pengetahuan kultural, karakter dimaknai sebagai “perilaku ideal atau bermoral individu maupun anggota masyarakat tertentu yang memiliki ciri khas, bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama yang dengan sengaja diinternalisasikan melalui proses pembiasaan atau penguatan dari lingkungan.”

Dalam pengertian pertama karakter diindikasikan ada yang baik dan ada yang buruk. Seseorang yang berperilaku sombong, tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter buruk, sementara orang yang berperilaku rendah hati, jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Sedangkan dalam pengertian kedua, karakter bermakna tunggal yakni hanya menunjuk kepada seseorang yang berperilaku mulia. Sementara seorang yang sombong, tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang tidak berkarakter.

Merujuk pada makna karakter secara kultural di atas menguatkan keyakinan, bahwa karakter sejatinya harus merupakan produk dari suatu proses budaya. Terkait hal ini Haryanto Kandani (2010:213) mengatakan, bahwa: “Karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa dibeli dan karakter tidak bisa ditukar. karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari.”

Ungkapan di atas menunjukkan, bahwa karakter merupakan perilaku sebagai hasil proses belajar atau proses pembudayaan, bukan semata-mata merupakan watak bawaan yang tidak dapat diubah. Demikian pula dikatakan oleh Lickona (1991:51), bahwa: “Secara konseptual, lazimnya, istilah 'karakter' dipahami dalam dua kubu pengertian. Pengertian pertama, bersifat deterministik. Di sini karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah teranugerahi atau ada dari sononya (*given*). Dengan demikian, ia merupakan kondisi yang kita terima begitu saja, tak bisa kita ubah. Ia merupakan tabiat seseorang yang bersifat tetap, menjadi tanda khusus yang membedakan orang yang satu dengan lainnya. Pengertian kedua, bersifat non deterministik atau dinamis. Di sini karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah *given*. Ia merupakan proses yang dikehendaki oleh seseorang (*willed*) untuk menyempurnakan kemanusiaannya.”

Dari paparan di atas, nampaknya paham non deterministik lebih menarik untuk dibicarakan sebagai suatu keyakinan bahwa karakter merupakan perilaku yang dapat dibentuk atau diubah melalui proses pendidikan. Sejalan dengan pikiran ini, maka yang dimaksud pendidikan karakter adalah upaya sadar dan disengaja dari orang dewasa/orangtua untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan terhadap peserta didik melalui pengajaran, bimbingan, pelatihan, dan pemodelan dirinya. Upaya pendidikan karakter sebenarnya merupakan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh Muslich (2011:75) bahwa “pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Jadi, Pendidikan merupakan sarana

strategis dalam pembentukan karakter.” Makna pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 ayat 1, juga mengindikasikan sebagai upaya pendidikan karakter, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Paparan di atas menunjukkan, bahwa pendidikan menjadi institusi yang paling bertanggung jawab dalam membangun karakter bangsa sekaligus peradaban bangsa. Karena hal ini yang menjadi inti dari tujuan pendidikan, seperti ungkapkan oleh Martin Luther King dalam Muslich (2011:75) bahwa: “*Intelligence plus character ...that is the goal of true education*” (Kecerdasan plus karakter...itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Socrates juga berkata, bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi *good and smart*. Demikian pula dalam sejarah Islam, misi utama Nabi Muhammad SAW, adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik (*good character*) atau akhlak yang mulia.

Kesuma dkk. (2012:7) mengatakan, dalam konteks pendidikan karakter, kami melihat bahwa kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berke-Tuhan-an (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdikan kepada Tuhan yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Ungkapan di atas menunjukkan, bahwa pendidikan karakter harus berusaha memelihara kefitrahan manusia yang senantiasa mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhannya. Pendidikan dapat dipandang gagal apabila tidak mampu memelihara kefitrahan manusia. Karena inilah sebenarnya ancaman terbesar umat manusia di abad modern, seperti diungkapkan oleh Shandel yang dikutip oleh Ali Shariati dalam Agustian (2005:39), bahwa bahaya terbesar yang dihadapi umat manusia pada zaman sekarang bukanlah ledakan bom atom, tetapi perubahan fitrah. Unsur kemanusiaan dalam diri manusialah yang sebenarnya sedang mengalami kehancuran sedemikian cepat, hingga yang tercipta sekarang ini adalah ras-ras non manusia – mesin berbentuk manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.

Ungkapan kekhawatiran di atas, sebenarnya merupakan lampu kuning bagi penyelenggara pendidikan sekolah di Indonesia yang sampai saat ini lebih mengedepankan pengembangan aspek kecerdasan intelektual, dibanding pengembangan aspek spiritual atau nilai-nilai transcendental. Sebenarnya konsep pendidikan untuk menghasilkan manusia berkarakter secara utuh di Indonesia telah lama diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara (1977 : 14-15), bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak; dalam pengertian Taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.

Dalam konteks pendidikan formal (sekolah) menurut Depdiknas (sekarang Kemendikbud) dalam Amri, S. Dkk., (2011 : 4) bahwa : “pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut”.

Ungkapan di atas menempatkan guru sebagai figur sentral dalam pendidikan karakter. Guru berarti harus mampu menampilkan dirinya sebagai model dari perilaku yang ideal untuk diteladani oleh peserta didik. Namun demikian, dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pendidikan harus dilibatkan, termasuk berbagai aspek dalam kegiatan pendidikan yaitu; isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Hal ini berarti pendidikan karakter hanya dapat dilakukan melalui pendekatan integratif dengan melibatkan seluruh unsur di sekolah baik suberdaya manusianya maupun sumber-sumber lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan karakter.

Selain melalui pendekatan integratif, secara substansial pendidikan karakter harus bersifat holistik atau menyeluruh atau *kaffah*, yakni harus menyentuh setiap bagian dari dimensi-dimensi kehidupan manusia. Hal ini seperti diungkapkan oleh Rukiyati (2013:198) bahwa pendidikan karakter harus bersifat holistik, terlebih lagi di Indonesia yang berpandangan hidup Pancasila. Pendidikan karakter holistik dapat diartikan sebagai upaya memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang utuh (*a whole human being*). Nilai-nilai kehidupan yang dimaksud merupakan kesatuan sistem nilai yang bertitik tolak dari filsafat manusia yang memandang bahwa manusia adalah makhluk individual-sosial, jasmaniah-rohaniyah, makhluk otonom sekaligus makhluk Tuhan.

Jadi, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai yang absolut. Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (2010:10) mengungkapkan bahwa: Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan *moral absolute*, karena itu *moral absolute* perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang baik dan benar. Pendidikan karakter kurang sepaham dengan cara pendidikan *moral reasoning* dan *value clarification* yang digunakan sebagai strategi dasar pendidikan karakter di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolute (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai —*the golden rule*. Contohnya adalah berbuat hormat, jujur, bersahaja, menolong orang, adil dan bertanggung jawab.

Atas dasar pendapat di atas, maka pendidikan karakter harus berpijak pada moral keutamaan atau moral absolut. Karena relativitas hanya akan membuat kebingungan arah dan ketidakpastian dalam praksis pendidikan. Hal yang patut diketahui, bahwa pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari

pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (*domain kognitif*) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (*domain afektif*) nilai yang baik dan biasa melakukannya (*domain perilaku*). Jadi pendidikan karakter terkait erat kaitannya dengan – *habit* atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan atau dilakukan.

Menyimak beberapa pendapat tentang pendidikan karakter di atas, menunjukkan adanya titik kesamaan, bahwa inti dari pendidikan karakter adalah upaya pengenalan nilai-nilai moral, menumbuhkan sikap moral pada diri seseorang, dan menjadikan seseorang bertindak atau berperilaku secara moral. Dengan kata lain pendidikan karakter merupakan upaya mengantarkan peserta didik agar mereka mampu memahami nilai-nilai inti, memperhatikan secara lebih mendalam mengenai benarnya nilai-nilai itu, dan kemudian melakukan apa yang diyakininya itu, sekalipun harus menghadapi tantangan dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Dengan kata lain mereka memiliki ‘kesadaran untuk memaksa diri’ melakukan nilai-nilai itu.

4. Relevansi Kepemimpinan Etis dengan Pendidikan Karakter

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa inti dari kepemimpinan etis adalah perwujudan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan moral oleh pemimpin itu sendiri. Sementara inti dari pendidikan karakter adalah ‘keteladanan’. Apa yang diteladankan? Tentu yang diteladankan adalah sikap, perilaku, gaya hidup yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang berlaku atau sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan baik-buruk, benar-salah, atau boleh-tidaknya suatu sikap atau tindakan yang diambil. Untuk itu relevansi kepemimpinan etis untuk pendidikan karakter menantang para pemimpin dan calon pemimpin agar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dapat berorientasi pada penghayatan dan perwujudan nilai-nilai moral.

a. Penyadaran nilai

Upaya penyadaran nilai ternyata mulai dipandang penting oleh pemimpin bangsa kita. Belakangan ini marak digalakkan pendidikan karakter, yakni dengan mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran. Namun, usaha penyadaran ini tidak semudah yang dibayangkan. Penyadaran nilai perlu dilakukan terlebih dahulu dari dalam diri sendiri dengan tahu dan mau, agar tidak menjadi ‘batu sandungan’ bagi orang lain atau ‘tong kosong berbunyi nyaring’. Artinya adalah penyadaran nilai tidak sekedar di bibir saja, tetapi meresap sampai ke lubuk hati yang paling dalam dan mendasari setiap tindakan yang hendak dilaksanakan. Kepemimpinan etis adalah kepemimpinan menuntun, mengarahkan dan mengamalkan nilai-nilai moral bersama orang-orang yang dipimpin.

b. Membangun konsistensi penghayatan nilai

Penyadaran dan internalisasi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, disiplin, bersih, sopan, dll sudah semestinya dibangun secara konsisten, tidak berubah-ubah seperti Bunglon. Kalaupun berubah, maka yang berubah adalah tingkatan-tingkatan, seperti dari yang jujur (sedang) menjadi jujur (luar biasa). Konsistensi penghayatan nilai ini dipandang penting, sebab banyak penyimpangan moral

terjadi, karena adanya inkonsistensi penghayatan nilai akibat pengaruh subyektivitas atas relasi tertentu.

c. Konsekuen terhadap perwujudan nilai

Konsekuen berarti bersedia menerima atau menanggung resiko dari suatu pilihan yang sudah diambil. Sering terjadi persoalan etis di mana pemimpin memilih diam, tidak mengklarifikasi sesuatu hal yang ditanyakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh ketika seorang pemimpin bersaksi di persidangan. Demi menjaga nama baik, maka keterangan-keterangan yang diberikan ‘mengambang’, tidak jelas dan berbelit-belit.

d. Pemimpin Etis sebagai teladan

Artinya pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang berkarakter. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, inti dari pendidikan karakter adalah keteladanan, jadi pemimpin yang etis merupakan teladan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Pendidikan karakter tidak sekedar teori yang didengungkan di mana-mana, tetapi mengambil bentuk “kesaksian hidup”, sehingga orang bisa dengan mudahnya menginternalisasi dan mengadopsi nilai-nilai menjadi miliknya atau terintegrasi dengan kepribadiannya. Ketika seseorang bertanya apa itu pendidikan karakter?, jawaban yang muncul bukan lagi konsep pendidikan karakter dari berbagai pihak, tetapi langsung bisa menunjuk figur pemimpin berkarakter.

C. Penutup

Terkait dengan pentingnya kepemimpinan etis dalam pendidikan karakter di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah dan para guru harus menjadi figur pemimpin yang dapat diteladani oleh siswa, misalnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal kebenaran, kedisiplinan dan kejujuran dalam rangka internalisasi nilai-nilai karakter di sekolah, Karena dengan sifat-sifat tersebut dapat meningkatkan kewibawaan atau pengaruh para pimpinan termasuk para guru di sekolah dalam meningkatkan moralitas siswanya. Proses penanaman nilai terhadap siswa akan gagal apabila para pimpinan di sekolah tidak memiliki komitmen kuat untuk mewujudkannya kebenaran, kedisiplinan dan kejujuran dalam berperilaku. Hal ini karena kebenaran dan kebaikan yang berjalan atau nyata akan lebih berpengaruh dari pada kebenaran atau kebaikan yang hanya berupa konsep yang diucapkan.

Daftar Pustaka

- Dewantara, K. Hajar. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). *Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice*. *Journal of Applied Psychology*,
- Agustian, Ginanjar Ary., (2005) *ESQ (Emosional Spiritual Quotient)*, Jakarta: Arga
- Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, (2010), *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Jakarta

- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Munandar. A.S. (2001). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Depok : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Muslich, Masnur, (2011), *Pendidikan Karakter; Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara
- Northouse, P. G. (2013). *Leadership: Theory and practice* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
- Ratna Megawangi (2004), *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat Untuk Membangun Bangsa*, Jakarta; IHF dan BP Migas
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Sujanto, Bedjo (2007). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta:Sagung Seto.
- Trevino, L. K., Brown M., & Hartman, L.P. (2003). *A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite*. Human Relations, 56(1), 5-37
- Yukl Gary, (2005), *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terjemahan, Jakarta: PT. Indeks,
- ([http://attanovi752011.blogspot.com/2012/12/kepemimpinan-etis-dan-relevansinya - bagi. html](http://attanovi752011.blogspot.com/2012/12/kepemimpinan-etis-dan-relevansinya-bagi.html))
- <http://liadwikristanti.wordpress.com/2013/04/12/nilai-dan-etika-dalam-kepemimpinan/> diunduh12/8/2014 -pukul-08.00,
- <http://www.sagepub.com/upm-data/47445chp16.pdf>,diunduh-04/ 02/2015
- <http://liadwikristanti.wordpress.com/2013/04/12/nilai-dan-etika-dalam-kepemimpinan/> diunduh12/08/ 2014-pukul-08.00,